

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Sumber Daya Manusia

Kata kualitas sering didengar dalam kehidupan sehari – hari, tetapi untuk memahami dan mendeskripsikan kata tersebut terkadang sulit karena setiap orang mendefinisikan berbeda – beda dan tergantung pada konteksnya. Kualitas sendiri memiliki banyak kriteria yang berubah secara terus menerus.

Menurut Ndraha (2012, hal. 5) sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya aparatur yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya.

Menurut Matindas (2012, hal. 3) kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya aparatur yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya.

Menurut Danim (2011, hal. 8) kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas

intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa kualitas sumberdaya manusia adalah sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik dan kualitas nonfisik (berupa kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan lainnya), yang mampu menciptakan hasil kompetitif, generative dan inovatif dengan menggunakan *intelligence*, *creative* dan *magination* mereka sendiri untuk meningkatkan produktivitasnya.

1.1.1.1 Aspek-aspek Sumber Daya Manusia

Aspek-aspek kualitas sumber daya manusia menurut Sahlan (2012, hal. 75) meliputi:

1. Aspek fisik (Kualitas Fisik)

Aspek fisik menyangkut kondisi kerja yang sangat baik, dimana pekerjaan yang sangat berbahaya dan menimbulkan masalah kesehatan kerja dapat dihindarkan. Ergonomi, yaitu suatu pengetahuan untuk menghubungkan manusia dengan pekerjaannya, yang menjadi perhatian para manajer untuk meningkatkan QWL (*Quality of Working Life*). Untuk menentukan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program peningkatan kesehatan dan gizi.

2. Aspek Non Fisik (Kualitas Non Fisik)

Aspek non fisik menyangkut kecerdasan dan mental. Pekerja adalah manusia yang memerlukan adanya pengakuan sebagai manusia. Bekerja

bagi sebagian manusia merupakan kepuasan dan bahkan sebagai prestise. Untuk meningkatkan kualitas non fisik, maka diupayakan melalui pendidikan pelatihan.

1.1.2 Sistem Pendidikan

Manusia tidak bisa lepas dari ilmu. Ilmu sendiri sulit didapatkan tanpa adanya pendidikan atau pembelajaran. Dalam proses pendidikan, diperlukan suatu strategi atau metode agar peserta didik dapat menggali dan mengembangkan suatu potensi dalam dirinya yang disebut dengan sistem pendidikan.

Tiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda menyesuaikan tipe peserta didik dari negara masing-masing. Seperti Jepang yang terkenal dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis teknologi (Doyon, 2001), United State dengan *The Programme for International Student Assessment (PISA)*, serta Finlandia yang dikatakan sebagai negara dengan patokan sistem pendidikan untuk sarjana (Goodill, 2017). Sedangkan Indonesia menggunakan Sistem Pendidikan Nasional semenjak keluarnya UU No. 20 Tahun 2003, sebagai perwujudan untuk mengembangkan masyarakat menjadi manusia berkualitas seiring menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Wahab, 2010).

Dalam pengelolaannya, Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan dengan sentralistik, dimana tujuan pendidikan, materi dan metode pembelajaran, tenaga kependidikan hingga untuk persyaratan kenaikan pangkat diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk nasional (Munirah, 2015).

Meskipun dikatakan masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam praktiknya tetap ditentukan oleh pemerintah. Contohnya ialah di perguruan tinggi, mahasiswa di Indonesia diberikan panduan ketat per semesternya maupun mata kuliahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan perguruan tinggi di Jerman yang lebih menuntut mahasiswanya untuk menentukan semua sendiri, dengan artian mahasiswa di Jerman mendapatkan kebebasan yang sangat besar untuk menentukan masa depannya (Syaifullah, 2014).

Usaha dalam memperbaiki kualitas pendidikan di sistem pendidikan sangkut pautnya dengan pendidikan karakter sebagai prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Indonesia yang sebelumnya menggunakan kurikulum KTSP dirubah sejak tahun 2013 menggunakan kurikulum 2013 yang berorientasi dalam pengembangan karakter peserta didik (Daga, 2018).

Dalam pelaksanaan pendidikan, guru akan dijadikan panutan oleh peserta didiknya. Oleh sebab itu kinerja guru yang memiliki sifat positif, kecerdasan emosional yang stabil, dan menguasai bahan pelajaran serta disiplin dapat membuahkan keberhasilan pendidikan (Arthur, Handoyo, & Daryati, 2019).

Sistem Pendidikan Nasional dibuat dengan anggapan serta harapan bahwa pendidikan Indonesia kedepannya memiliki masa depan yang cerah. Kendati demikian, Indonesia justru masuk kedalam daftar negara dengan mutu

pendidikan yang rendah dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN (ZA, 2017).

Sistem pendidikan ini juga menyebabkan kekeliruan paradigma pendidikan dimana pendidikan terlihat sebagai sekularisme, bahkan perlu diakui atau tidak sistem pendidikan di Indonesia adalah sekuler-materialistik yang dibuktikan dalam UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 15 (Al-jawi, 2012). Dengan kata lain, Indonesia masih mengalami degradasi makna pendidikan secara empirik (Sudarsana, 2016)

Sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain lebih banyak diwarnai dengan persaingan dan beban pembelajaran yang banyak karena peserta didik tidak dituntun untuk hanya memfokuskan potensi dan skill dalam dirinya melainkan diwajibkan mengemban pembelajaran yang sama rata dari satu peserta didik dengan yang lainnya (Adha, Gordisona, Ulfatin, & Supriyanto, 2019).

Pada sekolah kejuruan, sistem pendidikannya belum stabil. Karena belum ratanya pembagian peran yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan (Bake & Anto, 2015).

Melihat banyaknya kekurangan suatu sistem pendidikan membuat banyak negara yang mengambil langkah untuk meningkatkan pendidikan dengan mengadopsi atau memperbaiki sistem pendidikannya. Akan tetapi, masih banyak tantangan disertai dilema dengan berkembangnya zaman, oleh sebab itu pemerintah harus mengubah strategi belajar dan mengajar untuk mencapai

tujuan pendidikan (Al-ansi, 2017). Akan tetapi, karena Indonesia terlalu sering mengalami perubahan sistem pendidikan mengakibatkan kebingungan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.

Seperti perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 pada sistem pendidikan membawa kelebihan dan kekurangan pada masing-masing (Uran, 2018). Pada kurikulum 2013 peserta didik ditekankan untuk belajar dengan sistem student center dimana peserta didik akan membuat kelompok belajar dan diharuskan untuk terus aktif di dalam kelas. Sistem ini memerlukan kesiapan yang matang baik peserta didik maupun guru. Guru harus peka dalam mengarahkan siswa dalam belajar berkelompok serta mampu bertindak sebagai kolabolator, motivator, maupun model yang baik untuk peserta didik (Rahayu, 2016). Oleh sebab itu seorang guru harus memiliki kualifikasi yang baik.

Pemerintah dan pengembang kurikulum dipercaya membuat pembaruan untuk tujuan pendidikan nasional. Sayangnya, dalam praktik di lapangan terdapat kurangnya evaluasi kurikulum. Padahal, adanya evaluasi tersebut dapat melihat apakah kurikulum tersebut dapat mencapai tujuan serta melihat adakah kekurangan untuk peningkatan mutu pendidikan nanti (Uran, 2018).

Dan di era serba teknologi berbasis web sekarang ini sistem pendidikan di Indonesia sudah menerapkan blended learning yang dapat berkontribusi dalam kesiapan pelaksanaan elearning (Awodeyi, Akpan, & Udo, 2014). Inilah yang menjadi kelebihan dari sistem pendidikan yang baru karena pada blended learning peserta didik mendapatkan video pembelajaran atau presentasi secara

daring. Contoh penerapan blended learning ialah pada mata kuliah hidrologi di S1 PTB UNJ menerapkan video presentasi yang dikembangkan terbukti efektif (Arthur, Maulana, Sekartaji, & Dewi, 2019). Dan juga blended learning ini sangat berguna pada situasi sekarang dimana pandemi COVID-19 ini peserta didik tetap dapat belajar meskipun di rumah.

Melihat dari banyaknya kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia bukan berarti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan di Indonesia buruk, justru sebaliknya. Sistem pendidikan di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik akan tetapi penerapan dalam praktiknya saja yang belum maksimal.

1.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) mengatakan bahwa proporsi anak sekolah pada tingkat tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) telah diperhitungkan.

Angka Partisipasi Kasar ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan tertentu. Jadi, Angka Partisipasi Kasar yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang tinggi, terlepas dari ketepatan usia sekolah di tingkat pendidikan. Jika nilai Angka Partisipasi Kasar mendekati atau lebih dari 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang usia sekolahnya tidak mencukupi dan atau melebihi usia yang

seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sebenarnya.

Angka Partisipasi Kasar didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Partisipasi Kasar ini digunakan untuk mengetahui jumlah anak yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu di suatu wilayah tertentu. Angka Partisipasi Kasar dalam penelitian ini diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi Kelompok umur untuk penduduk umur sekolah Perguruan tinggi (19-23 tahun).

1.1.4 Perguruan Tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1 yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (UU 2 Tahun 1989 pasal 16 ayat (1)).

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang menitikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan kejuruan

yang menitikberatkan pada penyiapan lulusan untuk menerapkan keterampilannya. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti akademi, politeknik, sekolah menengah atas, institut dan universitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, sebagai serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berbasis budaya Indonesia.

a) Fungsi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa perguruan tinggi memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Mengembangkan kegiatan akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki manusia sehingga manusia menjadi manusia seutuhnya.

1.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, taraf hidup yang layak, kebebasan, harga diri, dan rasa hormat seperti orang lain, serta masa depan yang suram bagi bangsa dan negara. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia berbeda-beda, kemiskinan juga memiliki banyak aspek primer berupa miskin dalam aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder berupa miskin dalam jaringan sosial, sumber daya, keuangan, dan informasi (Wiguna, 2013).

Menurut Amarta sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan muncul ketika orang tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap sebagai fenomena multidimensi.

Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari segi ekonomi, materi dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan. Yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai

pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non-makanan dihitung dari kebutuhan minimum sandang, pendidikan, dan kesehatan. kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Haughton dan Shahidur (2012:3) kemiskinan selalu berkaitan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin sewaktu-waktu dapat menjadi miskin jika mengalami masalah seperti krisis keuangan, dan penurunan harga untuk usaha pertanian. Kerentanan adalah kunci dimensi kesejahteraan karena mempengaruhi perilaku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang tepat dan persepsi situasi individu mereka.

Kemiskinan berkaitan dengan tidak memiliki tempat tinggal, tidak dapat bersekolah, tidak dapat berobat ke dokter saat sakit dan tidak mengerti membaca atau menulis. Kemiskinan juga diartikan sebagai pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menimbulkan ketakutan akan masa depan hidupnya, sulitnya akses terhadap sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan kurangnya kebebasan untuk hidup. Sehingga kemiskinan juga diartikan sebagai kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan seseorang (Istifaiyah, 2015).

a) **Bentuk Kemiskinan**

Berdasarkan kondisi kemiskinan memiliki 4 bentuk. Berikut empat bentuk kemiskinan tersebut, yaitu (Sumarsono, 2003):

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, hal tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya. kualitas hidupnya. Garis kemiskinan adalah konsumsi rata-rata yang ditujukan untuk kebutuhan dasar dan berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam konsep penentuan atau penggambaran suatu kriteria seseorang atau kelompok dalam kelompok miskin, hal ini termasuk kemiskinan absolut.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai salah satu bentuk kemiskinan yang terjadi karena ketidakseimbangan dalam masyarakat yang meliputi ketimpangan standar kesejahteraan atau ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan daerah yang belum menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Daerah tertinggal termasuk dalam kategori daerah yang umumnya belum tercakup program pembangunan sehingga masyarakat tergolong

memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang diterima, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang sering terjadi karena masyarakat pada umumnya memiliki perilaku atau kebiasaan yang tidak ingin mengubah taraf hidupnya secara modern tetapi hanya berpegang pada suatu kondisi atau kebiasaan yang telah berlaku sejak lama di dunia. lingkungan masyarakat. Kebiasaan seperti itu dapat menyebabkan seseorang berperilaku seperti boros berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, kurang kreativitas, sikap malas dalam segala hal, dan sikap yang tidak mampu hidup mandiri atau selalu bergantung pada orang lain.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bagian dari bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya dan pada umumnya terdapat tatanan sosial, politik dan budaya yang kurang mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Jadi ada unsur diskriminatif dalam bentuk kemiskinan struktural ini. Dalam penjelasan ilmu sosial, salah satu bentuk kemiskinan seperti ini cukup sering kita jumpai.

1.1.6 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk semua bidang usaha dan jasa di suatu wilayah, dengan menerapkan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan total nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan perekonomian. Pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi apabila endogen (faktor dari dalam daerah) dan eksogen (faktor dari luar daerah) diperhatikan dan digabungkan. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan wilayah adalah dengan menggunakan model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahun (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran

dan struktur perekonomian, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nasution (2010) dalam Rahman (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Belanja Pemerintah Daerah, dan Tenaga Kerja.

Produk Domestik Regional Bruto adalah sejumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan sejumlah nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan hasil dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang kemudian dihitung dengan menggunakan harga-harga yang berlaku pada tahun berjalan. tahun tertentu. sebagai tahun dasar. Kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu wilayah dapat diketahui melalui PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dapat diketahui melalui PDRB atas dasar harga konstan. PDRB dapat digunakan untuk menentukan perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (Bank Indonesia, 2016).

a) Perhitungan PDRB

1) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi dalam pemaparan ini dikelompokkan menjadi 9 bidang usaha (sektor), yaitu:

- a) Peternakan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b) Penggalian dan Pertambangan
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Pengangkutan dan Komunikasi
- h) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i) Layanan termasuk layanan pemerintah. Masing-masing sektor ini dipecah lagi menjadi sub-sektor.

2) Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Imbalan untuk faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semua sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup depresiasi dan pajak tidak langsung bersih (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

3) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d) Perubahan inventori, dan
- e) Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konseptual, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Dengan demikian, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi dan harus sama dengan jumlah pendapatan faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena termasuk pajak tidak langsung neto.

1.1.7 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran untuk sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan prasarana pendidikan dan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Widodo, 2011). Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Hal ini terlihat dari besarnya belanja pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk

pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dinas dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang pendidikan. sektor dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan-pilihan kebijakan untuk suatu periode suatu periode di masa yang akan datang.

Berdasarkan struktur anggaran saat ini, anggaran pemerintah daerah disebut anggaran terpilih. Struktur anggaran pemerintah, dalam sistem anggaran di Indonesia terdapat dua macam pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan serta untuk pembayaran gaji pegawai dan lain-lain, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang tergolong pengeluaran untuk investasi pemerintah, termasuk investasi di bidang pendidikan dan kesehatan (publik).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. . Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada keluaran (*output oriented performance approach*) dengan

menggunakan konsep *value for money* dan prinsip-prinsip *good governance*. Pengelolaan anggaran merupakan tindakan penyeimbangan berbagai kebutuhan.

Kebutuhan di bidang pendidikan, sosial dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor publik, pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sendiri. Sehingga dengan otonomi daerah, pemerintah daerah akan mampu memenuhi kebutuhan pembangunannya. Selain memasukkan indeks kesehatan, penghitungan IPM juga mencakup indeks pendidikan. Indeks pendidikan berbeda dengan indeks kesehatan, karena indeks pendidikan mengakomodasi dua indikator komponen pencapaian, yaitu: indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks melek huruf dihitung berdasarkan perubahan angka melek huruf, sedangkan indeks rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah.

1.1.8 Anggaran Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) (UU Nomor 20 Tahun 2003). Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak tahun 2009, anggaran pendidikan yang disusun dalam postur APBN dilandasi oleh:

1. Amanat Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Pasal 31 ayat (4), yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No 024/PUU-V/ 2007, tanggal 20 Februari 2008, “Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.”
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Anggaran Pendidikan daerah berasal dari dana daerah dan transfer daerah bidang pendidikan. Dana daerah yaitu anggaran pendidikan yang dialokasikan di dinas pendidikan yang bukan berasal dari belanja negara. Sedangkan transfer daerah bidang pendidikan yaitu bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian di bidang pendidikan (Kemdikbud, 2019).

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kendatipun pemerintah daerah tidak berkewajiban dalam pengembangan perguruan tinggi, serta hanya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pendidikan menengah dan pendidikan dasar untuk provinsi dan kabupaten/ kota, namun kata dapat membantu dalam pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan dasar pertimbangan seperti berikut ini;

1. Perguruan tinggi sebagai aset daerah

Perguruan tinggi yang berada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota langsung ataupun tidak langsung telah menjadi bagian dari aset daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah membantu perguruan tinggi adalah bagian dari rasa memiliki dan bertanggung jawab pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga pendidikan tinggi di wilayahnya. Fakta menunjukkan lulusan perguruan tinggi dominan menjadi sumber tenaga kerja di daerah tersebut. Baik dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang berkedudukan di daerah dimana perguruan tinggi itu berada

2. Perguruan tinggi sebagai partner strategis

Keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah telah menjadi partner strategis bagi pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu terlihat dari kerjasama sinergis antara pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Seperti penelitian, penyusunan berbagai

macam regulasi, sebagai tenaga kelompok ahli dan bekerja sama dalam melakukan pengabdian dengan masyarakat

3. Perguruan tinggi sebagai center of excellent

Keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah secara nyata memperkecil capital flight (pindahnya modal) ke daerah lain ataupun ke negara lain. Oleh karena lulusan sekolah menengah tidak pergi ke luar daerah/luar negeri untuk melanjutkan sekolah. Hal ini berarti tidak ada perpindahan dana akibat melanjutkan pendidikan ke luar daerah atau ke luar negeri. Sebagai ilustrasi, jika seribu (1000) orang tamatan sekolah menengah melanjutkan studi ke perguruan tinggi luar daerah dengan rata-rata biaya perbulan 5 juta perorang berarti ada capital flight 5 miliar perbulan dari daerah tersebut.

Pertahun berarti ada 60 Miliar. Sebaliknya jika (1000) mahasiswa tersebut tidak pergi ke luar daerah dan melanjutkan di daerah asal, maka dana 60 miliar tersebut berputar pada suatu daerah maka dampak ikutannya (multiflyer effect) terhadap tumbuhnya berbagai aktivitas (ekonomi & sosial) sangat signifikan. Apalagi dengan keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah dapat mendatangkan mahasiswa dari luar daerah. Sudah pasti dampak ekonomi dan sosial serta aktivitas lain sangatlah besar. Sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar menjadi center of excellent suatu daerah.

3.1.1 Hubungan Variabel Bebas dan Terikat

A. Hubungan Jumlah Perguruan Tinggi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wujud tempat yang digunakan dalam keberlangsungan proses pendidikan. penyediaan perguruan tinggi adalah untuk menampung peserta didik sebanyak kapasitas perguruan tinggi tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah permintaan peserta didik terus meningkat maka pemerintah wajib menyediakan perguruan tinggi dengan kapasitas yang dibutuhkan. Mengenai jumlah perguruan tinggi dan peserta didik tentunya berfokus pada seberapa besar tingkat permintaan peserta didik terhadap ketersediaan sekolah. Namun dalam penelitian ini melihat sebaliknya, dari banyaknya ketersediaan jumlah perguruan tinggi yang ada maka seberapa besar berimplikasi terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Zimmerman dan Neilson (2014) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh pembangunan sekolah terhadap angka partisipasi sekolah yang ditunjukkan dengan peningkatan pendaftaran jumlah siswa/siswi sebesar 17,3% sejak pasca konstruksi.

Wujud dari keberhasilan program pemerintah dapat dilihat dari seberapa tinggi minat masyarakat dalam mengikuti program tersebut. Ukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan setiap tahunnya. Indikator ini di gunakan secara

sistematis oleh BPS dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pendidikan disebut Angka Partisipasi Kasar (APK). Sementara itu, jumlah perguruan tinggi sebagai salah satu yang menunjang pemerataan pendidikan tersebut.

B. Hubungan Jumlah Penduduk Miskin dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Salah satu indikator penting dalam mengukur pendidikan adalah dengan melihat besarnya APK. Masyarakat sebagai sasaran utama APK PT dimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pendidikan akan ditentukan oleh motif masyarakat sendiri. Secara garis besar, keluarga menjadi pemilik utama atas keputusan mengikutsertakan anak atau anggota keluarganya untuk mengenyam pendidikan formal. Chankseliani (2014) pada studi komparatifnya menyebutkan tiga sumber utama yang dapat menjelaskan berbagai tingkat pendaftaran sekolah swasta di Negara negara bekas-Soviet: berasal dari permintaan atau keputusan keluarga, dari penawaran bisnis swasta, dan keberadaan kelompok keagamaan dan filantropi.

Presentase penduduk miskin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana semakin banyak penduduk miskin di daerah tersebut maka angka partisipasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan menurun karena masyarakat yang memiliki pendapatan rendah tidak mampu untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Teori lingkaran kemiskinan dibagi menjadi tiga bentuk dimana bentuk ketiga dari teori

tersebut yaitu rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut negara berkembang seperti Indonesia ini akan tetap dalam lingkaran kemiskinan tersebut apabila keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan belum dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal. Kurangnya pengembangan kekayaan alam menyebabkan tingkat pembangunan masyarakat akan tetap rendah (pendidikan rendah). Hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi saling ketergantungan dimana kekayaan alam yang belum dikembangkan menyebabkan produktivitas rendah sehingga pendapatan masyarakat rendah yang akibatnya bagi masyarakat sendiri kekurangan modal untuk dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akses untuk mengetahui informasi tentang pendidikan tersebut sangat kurang optimal untuk benar-benar tersampaikan kepada masyarakat ekonomi rendah khususnya informasi tentang pendidikan tinggi. Dalam kasus ini yang dimaksud akses adalah segala kemudahan yang dapat di peroleh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat ekonomi lemah.

C. Hubungan PDRB Perkapita dengan Angka Partisipasi Ksar (APK) Perguruan Tinggi

Produk Domestik Nasional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi atau usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan

penduduk di suatu wilayah secara rata-rata dapat menggunakan angka PDRB perkapita. PDRB perkapita suatu penduduk di daerah tertentu dihasilkan dari pembagian pendapatan domestik dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan perkapita dapat menggambarkan ekonomi masyarakat dimana semakin tinggi pendapatan perkapita yang diperoleh maka angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pendidikan akan meningkat begitu pula sebaliknya sebab masyarakat dapat mengikuti proses pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Tinggi rendahnya pendapatan suatu keluarga erat kaitannya dengan keberhasilan seorang anak. Keluarga yang mampu dan berpendapatan tinggi atau cukup cenderung memberikan fasilitas yang memadai kepada anak atau anggota keluarganya khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sedangkan keluarga yang berpendapatan rendah atau masyarakat ekonomi lemah tidak mampu memenuhi perlengkapan belajar anak atau anggota keluarganya (tempat belajar, peralatan belajar dan uang sekolah) maka cenderung kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

D. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Anggaran pendidikan merupakan biaya atau dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya yang dikeluarkan berupa pengadaan pembangunan sekolah, pembelian fasilitas, uang sekolah, serta biaya-biaya

penunjang pelaksanaan proses pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Faguet dan Sanchez (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan yang dilihat dari angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang pendidikan maka akan semakin besar juga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di daerah tersebut.

E. Hubungan Anggaran Pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perguruan Tinggi

Todaro dan Smith dalam bukunya *Economic development: The AddisonWesley series in economics* berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang diterima seseorang ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran (M. P. Todaro & Smith, 2015). Di sisi permintaan, terdapat dua pengaruh yang mempengaruhi jumlah sekolah yang diinginkan. adalah (1) prospek siswa yang lebih berpendidikan untuk memperoleh pendapatan yang jauh lebih banyak melalui pekerjaan sektor modern di masa depan (manfaat pendidikan pribadi keluarga) dan (2) biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung oleh siswa atau keluarga untuk menempuh pendidikan.

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa, pada sisi penawaran (oleh negara), pendidikan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas yang tersedia dapat mempengaruhi tingkat pendidikan yang diterima oleh seseorang.

3.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lestari, Niken Ajeng (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah serta Angka Putus Sekolah Tingkat Dasar dan Sekolah Menengah Pertama: Data Panel 33 Provinsi di Indonesia Tahun 20006-2011	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek Sekolah (rasio guru murid dan jumlah sekolah) dan aspek karakteristik daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Angka pasrtisipasi sekolah jenjang SD dan SMP di Indonesia	Variabel Independen: PDRB perkapita dan Jumlah penduduk miskin	Terdapat perbedaan pada variabel dependent yaitu Angka Partisipasi Kasar, lokasi penelitian di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan tahun penelitian 2010-2020.
2	Ummy Zulfa Rahmatin (2006)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kota Surabaya	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negative secara signifikan.	Variabel Independen: Jumlah Sekolah	Lokasi dan tahun penelitian berbeda serta variabel dependent pada penelitian ini menggunakan jenjang Perguruan Tinggi.
3	Citra Septiana dan Hutapia (2004)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Sumatera	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap APS sedangkan Angka kematian bayi berpengaruh negative terhadap APS	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah dalam pendidikan	Lokasi, tahun dan variabel dependent pada penelitian ini menggunakan Angka Partisipasi Kasar
4	Habibah (2019)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi pada 32 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2016	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel porsi pengeluaran pemerintah pusat di bidang pendidikan, rasio dosen-mahasiswa dan jumlah populasi berpengaruh secara signifikan terhadap APK PT	Variabel Independen: Jumlah PT dan PDRB perkapita Variabel Dependent: APK Perguruan Tinggi	Tidak terdapat variabel Jumlah Penduduk Miskin, lokasi penelitian di Pulau Jawa dan tahun 2010-2020

5	Guryan, Jonathan (2001)	<i>Does Money Matter? Regression-Discontinuity Estimates From Education Finance Reform In Massachuestts</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan tertentu bantuan pemerintah mendorong peningkatan nilai ujian	Variabel Independent: Pendapatan Perkapita	Lokasi, tahun dan variabel dependent pada penelitian ini menggunakan Angka Partisipasi Kasar
6	Khairunnisa dan Sri Hatoyo (2015)	Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi kerja berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Barat sedangkan kemiskinan berpengaruh negative terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Barat	Variabel Independent: Kemiskinan	Dalam penelitian ini tidak terdapat variabel Paertisipasi Kerja. Lokasi dan tahun penelitian berbeda
7	Ervia Septiani Arzelina, Sri Sulistijowati Handajani, Etik Zukhr (2019)	Model Angka Partisipasi Sekolah Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah, persentase penduduk miskin, kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap APS usia wajib belajar di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 dan didapatkan hasil model regresi data panel terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM).	Variabel Independent: Penduduk Miskin	Pada penelitian terdahulu kemiskinan dalam presentase sedangkan dalam penelitian ini Jumlah Penduduk Miskin tahun penelitian 2010-2020
8	Jolianis (2015)	Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, 2) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah, 3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah.	Vriabel Independent: Pendapatan Perkapita	Lokasi dan tahun penelitian berbeda serta variabel dependent pada penelitian ini menggunakan jenjang Perguruan Tinggi.
9	Ageng Sri Pertiwi (2006)	Pengaruh Kartakteristik Wilayah Terhadap Pemerataan Angka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Angka	Variabel Independen: Kemiskinan	Terdapat perbedaan pada variabel dependent yaitu Angka Partisipasi Kasar,

		Partisipasi Sekolah Menengah Antar Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Magentan	Partisipasi Sekolahsedangka Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magentan		lokasi penelitian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. tahun penelitian 2010-2020.
10	Eva, dkk (2015)	<i>Hubungan Partisipasi Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia</i>	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat kemiskinan berpengaruh negative namun signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia sedangkan Indes Pembangunan Manusia brpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia	Variabel Independent: Kemiskinan	Lokasi dan tahun penelitian berbeda serta variabel dependent pada penelitian ini menggunakan jenjang Perguruan Tinggi.

Renno Abdi Prakoso (2020) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Pulau Jawa Tahun 2010-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Jawa periode 2010-2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA, dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMA. Penelitian ini menggunakan metode analisis Data Panel dengan model Fixed Effect (FEM) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi dan variabel Tingkat Partisipasi Murni (APM) berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel Tingkat Pendidikan dan variabel Angka Partisipasi Bruto (APK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.

Nani Rohmani (2021) yang berjudul “Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Seluruh Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran anak yang mengikuti PAUD dengan mengolah data Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menghitung rata-rata dan rasio menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran di setiap provinsi di Indonesia tidak merata. Provinsi yang melebihi rata-rata nasional adalah DI Yogyakarta dan terendah adalah Papua. Sedangkan rasio kenaikan dan penurunan APK anak yang bersekolah di PAUD adalah 90% dari seluruh Indonesia, hanya dua provinsi yaitu Kepulauan Riau dan DKI Jakarta yang mengalami penurunan rasio tersebut.

Solechah (2010) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan.” Metode penelitian menggunakan panel tahun 2007-

2009 dengan variabel dependen Angka Partisipasi Sekolah dan variabel independen desentralisasi fiskal, pendapatan perkapita serta rasio guru dan murid. Hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah, yang terakhir rasio guru dan murid berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

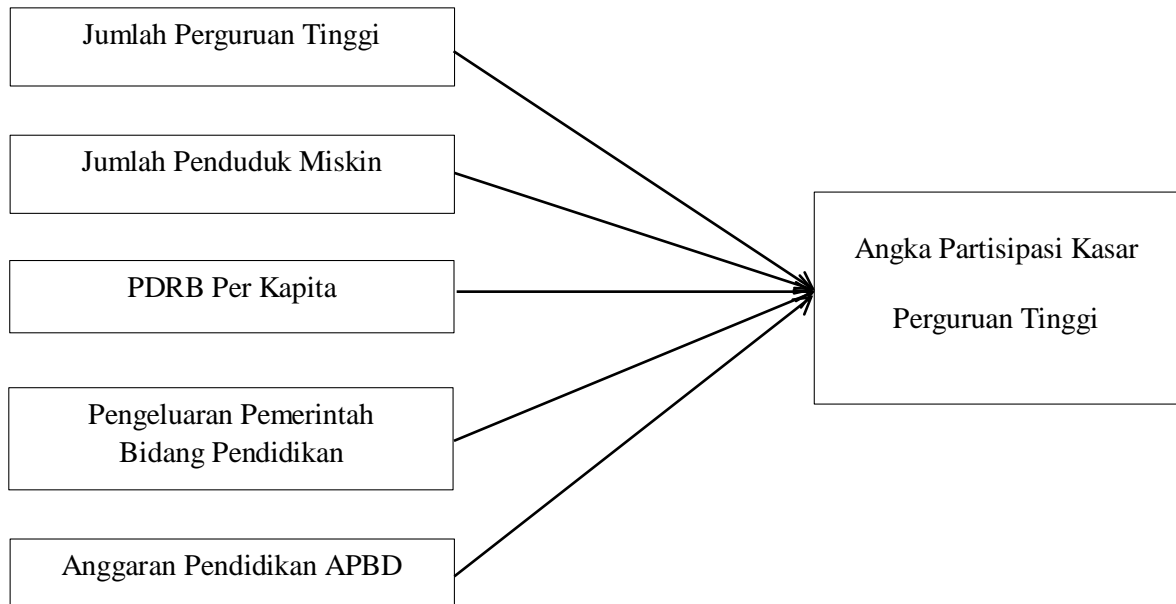
3.2 Kerangka Pemikiran

Menurut teori *human capital* (Schultz 1961) mengatakan bahwa pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor terpenting yang akan menghasilkan individu yang memiliki produktivitas tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas individu tersebut dalam proses pembangunan dan hal tersebut dapat menyebabkan tingkat pendapatan yang dihasilkan jauh lebih tinggi. Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Namun sebaliknya jika terdapat kegagalan dalam pembangunan pendidikan akan melahirkan berbagai masalah seperti: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan *welfare dependency* yang akan menjadi beban sosial politik bagi negara.

Menurut Hubbard, et al. (2012) Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk. Investasi yang pemerintah berikan dalam sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan masyarakat sehingga dimasa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang

diperoleh dari hasil saat bekerja serta meningkatkan produktivitas pekerja. Dalam Keterlibatan pemerintah dalam membiayai serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh utama dalam akumulasi *human capital* suatu negara. Menurut Wintari (2014) bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatkan jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut maka semakin muda bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, atau menerapkan hasil dari kemajuan teknologi pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan standar ekonomi masyarakat dan hidup bangsa.

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) merupakan presentase jumlah penduduk yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk usia kuliah (19-23 tahun). Besarnya APK PT menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat memperoleh akses jenjang pendidikan tinggi, namun kenyataannya Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih relatif rendah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) ini tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan menjelaskan gambaran kondisi Partisipasi masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam mengikuti pendidikan tinggi serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) tersebut. Variabel bebas yang akan diteliti yaitu Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Anggaran Pendidikan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dari Permasalahan dan alur kerangka pemikiran diatas, maka hipoteseis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah Perguruan Tinggi diduga memiliki hubungan negatif terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
2. Jumlah Penduduk Miskin diduga memiliki hubungan positif terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
3. PDRB Perkapita diduga memiliki hubungan positif terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan diduga memiliki hubungan positif terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
5. Anggaran Pendidikan diduga memiliki hubungan positif terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera

